

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA
AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2025**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu yang di syaratkan adalah terselenggaranya Good Governance. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembnangunan dapat berlangsung berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme. Untuk itu Laporan Pelaksanaan Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dibuat dalam rangka mempersiapkan pertanggungjawaban untuk laporan kinerja Tahun 2025 yang di dasarkan perencanaan strategis yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Renstra 2025-2029.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Monitoring rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2025 adalah wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Monitoring rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2025 adalah memaparkan gambaran capaian tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mencakup realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

1.3 Rencana Strategis

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah diuraikan kontribusi urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan dalam memberhasilkan visi dan misi RPJMD 2025-2029 Provinsi Kepulauan Riau :

1.3.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dicapai selama lima tahun (2025-2029), yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”** dengan Misi sebagai berikut:

- Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
- Misi 2: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah;
- Misi 3: Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter;
- Misi 4: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
- Misi 5: Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi yang terkait dengan tugas DLHK yaitu misi kelima (ke-5) **“Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”**. Misi ke-5 ini memiliki tujuan mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah, dengan indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK. Sasaran yang dirumuskan yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dan Indeks Ekonomi Hijau Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, DLHK Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan dan sasaran disertai indikator yang terukur untuk dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tujuan yang dirumuskan oleh DLHK Provinsi Kepulauan Riau yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1.3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun tujuannya yaitu; **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari

masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025-2029 menetapkan Sasaran yang dirumuskan oleh DLHK Provinsi Kepulauan Riau ada 2 yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut”** dan **“Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan”**, dengan indikator:

- 1. Indeks kualitas udara;
- 2. Indeks kualitas air;
- 3. Indeks kualitas air laut;
- 4. Indeks kualitas tutupan lahan;
- 5. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi.

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,46 Indeks

BAB II

HASIL MONITORING PELAKSANAAN RENCANA AKSI

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai bagian dari hasil APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang berpedoman Renstra 2025-2029 berkontribusi pada capaian target kinerja Indikator Kinerja Utama dengan di dukung anggaran sebesar Rp. 3.977.441.269,- yang bersumber pada APBD Provinsi Kepulauan Riau yang termuat dalam Program kerja sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Triwulanan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	1 tahun	75,46 Indeks		
			Triwulan I	69,58 Indeks	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	216.747.711
			Triwulan II	70,85 Indeks	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	216.747.711
			Triwulan III	72,98 Indeks	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	216.747.711
			Triwulan IV	75,46 Indeks	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	72.117.000
					Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72.117.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	72.117.000
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.428.400
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10.428.400
					Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10.428.400
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.197.821.048
					Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.197.821.048

				Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1.197.821.048
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.176.571.760
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	142.702.200
				Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi	131.740.400
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	10.961.800
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	838.258.300
				Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	118.000.000
				Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	640.610.300
				Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	79.648.000
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.128.825.560
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	177.000.000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	58.000.000
				Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	893.825.560
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun	66.785.700
				Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	66.785.700
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	303.755.350
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	303.755.350
				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	303.755.350

2.2 Hasil monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi

2.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV

Sasaran Strategis 1 : Menurunnya Pencemaran dan dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Sasaran ini dimaksudkan untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan dalam capaiannya, ada beberapa indikator yang mendukung capaian pengelolaan lingkungan hidup tersebut yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas air laut dan indeks kualitas tutupan lahan. Adapaun capaian Indikator Kinerja sasaran tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 dapat disajikan pada table dibawah ini:

Tabel. 2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis sampai dengan Triwulan IV tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target	Indikator Kinerja Antara (Outcomes Program)	Capaian Kinerja s/d Triwulan IV 2025
1	2	3	4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	75,46 indeks	Indeks Kualitas Air	72,72
		Indeks Kualitas Air Laut	85,91
		Indeks Kualitas Udara	76,20
		Indeks Kualitas Tutup Lahan	75,75

Pada table 2.2 tersebut diatas bahwa sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi tahun 2025 bdan sesuai dengan Renstra 2025-2029 sebesar 75,46 dengan capaian IKLH Provinsi sebesar 77,62.

Hasil capaian kinerja IKLH dari perhitungan 4 indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 72,72 dengan rating Sedang; Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah atau pembukaan lahan untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air. Oleh karena itu Indek Kualitas Air (IKA) capaiannya belum masuk kategori Baik.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 76,20 dengan rating Sedang; Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan di banding tahun 2024, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi

tersebut indeks respon daerah menurun jika disbanding pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti Car Free Day (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda tetapi pembukaan lahan untuk kawasan industri semakin banyak karena banyaknya investasi yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, target dan capaian pada IKU. Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di letakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Air Quality Monitoring System (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis adalah sistem untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 75,75 dengan rating Sedang; Pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 kab/kota yang meningkat nilai IKTL disbanding tahun 2024 yaitu 66,18,. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya. Penghijauan lingkungan yang dilakukan pada lahan-lahan terbuka atau lahan kritis.
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 85,91 dengan rating Baik. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat (*landbase pollution*).

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya, sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2025 sebesar 76,2 poin, menurun 15,92 poin dibandingkan dengan hasil perhitungan tahun 2045 sebesar 92,12 poin. Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udaranya sebanyak 7 kabupaten/kota dengan menggunakan metode Passive Sampler dan hanya dua Kota yang menggunakan metode AQMS ada dua Kota yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.



2. Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2025 sebesar 72,72 poin meningkat 18,74 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 53,98 poin. Jumlah pelaksanaan pemantauan IKA dilaksanakan oleh 7 Kabupaten Kota, yang dilaksanakan oleh Petugas PIC DLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.3
Pemantauan Indeks Kualitas Air

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA	IKA INA	IKA INA MUTU
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat			
1	Kabupaten Karimun	1	8	0	0	7.78	44.44	0.00	0.00	52.22	72.56	Sedang
2	Kabupaten Bintan	82	25	0	0	53.64	11.68	0.00	0.00	65.33	82.93	Sedang
3	Kabupaten Natuna	14	5	0	0	51.58	13.16	0.00	0.00	64.74	81.53	Sedang
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	0	6	0	0	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	73.56	Sedang
5	Kabupaten Lingga	6	6	0	0	35.00	25.00	0.00	0.00	60.00	81.83	Sedang
6	Kota Tanjung Pinang	7	23	0	0	16.33	38.33	0.00	0.00	54.67	73.78	Sedang
7	Kota Batam	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2025 sebesar 75,75 poin meningkat 9,57 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 66,18 poin. Hal ini adanya pengendalian dan pembatasan kerusakan Kawasan hutan di tujuh Kabupaten/Kota, pemulihan lahan yang dilakukan seluas 472,5 Ha yang terdapat di 13 lokasi seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Tahun 2025

No.	Lokasi	Instansi Pelaksana	Luas (Ha)
1	Kecamatan Gunung Kijang	DLHK Prov. Kepri	1,25
2	Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur	DLHK Prov. Kepri	1,25
3	Tanjung Tilli Kecamatan Bintan Timur	DLHK Prov. Kepri	10
4	Kecamatan Sagulung-Batam	DLHK Prov. Kepri	1
5	Tembeling Tanjung-Bintan	DLHK Prov. Kepri	1
6	Setokok-Batam	DLHK Prov. Kepri	3
6	HL Duriangkang Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Batam	Direktorat Pengelolaan Air Minum Badan Usaha SPAM, Fasilitas, dan Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	10
7	HL Tembesi Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam	Gapoktan Maju Bareng	180
8	HL Dangas Kelurahan Tanjung pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam	KTH Dangas Hijau Makmur	30
9	HL Sei Hulu Galang Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Batam	Kelompok Tani Hutan Barelang Jaya, Kelompok Tani Hutan Jaya Tani	200
10	HL Sei Pulai, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Bintan	Kelompok Tani RHL Bintan Tani Bertuah	15
11	HP Gunung Demit, Desa Topaya Utara, Kecamatan Toapaya, Bntan	Kelompok Tani Bayu Asih	10
12	HP Gunung Demit, Desa Topaya Utara, Kecamatan Toapaya, Bntan	Kelompok Tani Lome Hijau	10
JUMLAH			472,5

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) tahun 2025 sebesar 85,91 poin meningkat 0,38 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 85,53 poin, Pengambilan sampel untuk Indeks Kualitas Air Laut dilakukan pusat, Adapun kegiatan daerah antara lain penanaman mangrove di pesisir, pemantauan dan pengawasan Perusahaan pengelola limbah B3.

Untuk meningkatkan IKLH Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya lainnya yang mendukung keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Air

- Pengendalian pencemaran air limbah industri dan domestik melalui penegakan regulasi, inspeksi berkala, dan sanksi yang tegas.
- Pembangunan dan peningkatan kapasitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) baik komunal maupun kawasan industri.
- Rehabilitasi sungai, danau, dan daerah aliran sungai (DAS) melalui penanaman vegetasi penyangga dan pengerukan sedimen.
- Gerakan pengurangan sampah plastik dan penguatan program bank sampah untuk menekan limbah ke badan air.
- Pemantauan kualitas air secara rutin dan real-time untuk deteksi dini pencemaran.

2. Meningkatkan Kualitas Udara

- Pengendalian emisi industri melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, scrubber, dan standar baku mutu emisi.
- Pembatasan kendaraan bermotor tinggi emisi, misalnya uji emisi wajib, pembatasan kendaraan tua, dan manajemen lalu lintas.
- Pengembangan transportasi publik massal dan transportasi rendah karbon (EV, sepeda, jalur pedestrian).
- Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan patroli, pemantauan hotspot, dan pemberdayaan masyarakat.
- Penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang membantu penyerapan karbon dan meningkatkan kualitas udara perkotaan.

3. Meningkatkan Tutupan Lahan / Vegetasi

- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui reboisasi, penghijauan, dan penguatan kawasan lindung.
- Penegakan hukum terhadap perambahan hutan dan konversi lahan ilegal.
- Pengembangan perhutanan sosial untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan berkelanjutan.
- Pengendalian alih fungsi lahan melalui tata ruang yang disiplin dan pengawasan ketat.
- Restorasi ekosistem gambut dan mangrove yang berfungsi penting sebagai penyerap karbon.

4. Penguatan Kebijakan, Pengawasan, dan Kelembagaan

- Integrasi kebijakan lingkungan dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD/RKPD).
- Peningkatan kapasitas SDM lingkungan dalam pemantauan, analisis, dan penegakan hukum.

2.2.2 Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian target kinerja adalah suatu realisasi hasil kerja dalam suatu program/kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan oleh OPD serta dilaksanakan

dalam waktu tertentu. Sesuai dokumen rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Adapun pagu total anggaran untuk program/kegiatan Tahun 2025 sebesar Rp. 3.977.441.269,-. Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah berdasarkan rata-rata realisasi anggaran untuk masing-masing program sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada uraian terlampir :

BAB III

PENUTUP

Laporan Hasil Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2025 disusun sebagai bahan pendukung kelengkapan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan dibuatnya Laporan Monitoring rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dimasa mendatang dapat lebih ditingkatkan dan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Demikian Laporan Monitoring rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 disusun. Semoga Laporan ini menjadi salah satu perwujudan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

Tanjungpinang, Januari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Kepulauan
Riau,



Hendri, S.T
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710501 200312 1 008

LAMPIRAN

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

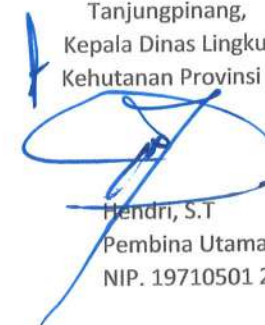
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2025 (Oktober s/d Desember)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerj Utama	Target Tahunan		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan TW IV		Realisasi Kinerja TW IV		Triwulan	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja
			Triwulanan	Target			Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Kinerja (%)	Fisik (%)		Kinerja (%)	Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1 tahun	75,46 Indeks									
			Triwulan I	69,65 Indeks	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	216.747.711					I	25,00	25,00
			Triwulan II	72,78 Indeks	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	216.747.711					II	50,00	50,00
			Triwulan III	73,53 Indeks	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	216.747.711	202.033.517	93,21	100,00	100,00	III	75,00	75,00
			Triwulan IV	75,46 Indeks	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	72.117.000					IV	100,00	100,00
					Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72.117.000							
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	72.117.000	71.758.000	99,50	100,00	100,00			
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.428.400							
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10.428.400							
					Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10.428.400	9.568.650	91,76	100,00	100,00			
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.197.821.048							
					Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.197.821.048							
					Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1.197.821.048	1.187.931.990	99,17	100,00	100,00			
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.176.571.760							
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	142.702.200							
					Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi	131.740.400	117.729.219	89,36	100,00	100,00			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	10.961.800	10.248.000	93,49	100,00	100,00			

					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	838.258.300							
					Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	118.000.000	88.093.490	74,66	100,00	100,00			
					Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	640.610.300	572.915.752	89,43	100,00	100,00			
					Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	79.648.000	77.650.002	97,49	100,00	100,00			
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.128.825.560							
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	177.000.000	161.984.508	91,52	100,00	100,00			
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	58.000.000	54.965.464	94,77	100,00	100,00			
					Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	893.825.560	717.345.575	80,26	100,00	100,00			
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun	66.785.700							
					Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	66.785.700	65.274.540	97,74	100,00	100,00			
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	303.755.350							
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	303.755.350							
					Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	303.755.350	292.625.500	96,34	100,00	100,00			

Tanjungpinang, Januari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau,



Hendri, S.T
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710501 200312 1 008